

**ANALISIS PERAN BUMDES NGINGAS MAKMUR ABADI DALAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
DI DESA NGINGAS KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**

Rohmi Nur Utami

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

rohmi.21153@mhs.unesa.ac.id

Dra. Meirinawati, M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

BUMDes Ngingas Makmur Abadi merupakan penyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD) terbanyak, di tahun 2019 dari total PAD Rp 90 juta per tahun, BUMDes Ngingas Makmur Abadi menyumbang Rp 50 juta. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam mengembangkan IKM memiliki kendala yakni keterbatasan SDM dan kesulitan untuk merangkul IKM agar dapat bergabung dibawah naungan BUMDes. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih jauh peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam pengembangan IKM di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Peran Gede Diva (2009), meliputi fasilitator, katalisator, dan regulator. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertama, BUMDes sebagai fasilitator memiliki peran dalam pengembangan IKM. Kedua, sebagai katalisator BUMDes memiliki peran yang cukup baik dalam pengembangan IKM, meskipun belum maksimal. Ketiga sebagai regulator, BUMDes menunjukkan tidak memiliki peran dalam pengembangan IKM.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes

Abstract

BUMDes Ngingas Makmur Abadi is the largest contributor to Village Original Revenue (PAD). In 2019, out of a total PAD of IDR 90 million per year, BUMDes Ngingas Makmur Abadi contributed IDR 50 million. BUMDes Ngingas Makmur Abadi has obstacles in developing IKM, namely limited human resources and difficulties in embracing IKM so that they can join under the auspices of BUMDes. The purpose of this research is to further understand the role of BUMDes Ngingas Makmur Abadi in the development of IKM in Ngingas Village, Waru District, Sidoarjo Regency. This type of research uses a descriptive qualitative method. The theory used in this study is Gede Diva's Role Theory (2009), including facilitators, catalysts, and regulators. Data collection techniques were carried out by observation, interview, and documentation methods. Data analysis techniques were carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research and discussion show that first, BUMDes as facilitators have a role in the development of IKM. Second, as a catalyst BUMDes has a fairly good role in the development of IKM, although it is not maximized. Third, as a regulator, BUMDes shows that they have no role in the development of IKM.

Keywords: Role, Community Empowerment, BUMDes

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik dari segi material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu aspek penting pembangunan nasional yakni kemajuan dan kemandirian desa. Iskandar (2020) menjelaskan bahwa apabila permasalahan sosial-ekonomi di pedesaan dapat

diselesaikan, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencapai pembangunan nasional, pemerintah memfokuskan pembangunan dari desa. Mengingat angka jumlah kemiskinan Indonesia didominasi pedesaan, hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan di desa cukup tinggi apabila dibandingkan angka kemiskinan di kota. Hal ini dibuktikan dengan data tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah

Tahun	Desa	Kota
2018	13,10	6,89
2019	12,60	6,56
2020	13,20	7,88
2021	12,53	7,60
2022	12,36	7,53

Sumber : BPS, 2022

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta pemanfaatan potensi desa secara berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kemandirian desa. Pembangunan desa juga dapat meningkatkan PAD, dimana PAD tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Disamping hal itu, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana sejumlah ratusan juta hingga milyaran rupiah untuk desa dimana besaran dana yang diterima menyesuaikan jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, penggunaan dana desa salah satunya diutamakan untuk pemulihan ekonomi nasional di bawah kewenangan desa, termasuk pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDes Bersama serta pengembangan usaha ekonomi produktif yang diprioritaskan oleh BUMDes Bersama..

Utami dkk (2023) menjelaskan BUMDes merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan potensi

desa. Peran BUMDes termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimana pendapatan BUMDes digunakan untuk mengembangkan bisnis, membangun desa, mendorong masyarakatnya, dan membantu orang miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Nursetiawan dalam Siswanda dan Meirinawati (2021) menjelaskan bahwa BUMDes bekerja dengan cara mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat ke dalam lembaga atau bisnis profesional sambil mempertahankan potensi asli desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes yang disepakati melalui musyawarah desa. BUMDes harus melakukan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat terus berusaha untuk mengoptimalkan pendirian BUMDes karena diharapkan akan meningkatkan ekonomi desa.

Jumlah desa yang telah memiliki BUMDes belum mencapai 75% dari total desa yang ada di Indonesia. Berdasarkan BPS Tahun 2022 jumlah desa di Indonesia berjumlah 83.794 desa sedangkan jumlah BUMDes secara keseluruhan sebanyak 48.512 BUMDes.

Permasalahan ketidaksesuaian persentase jumlah BUMDes dengan persentase BUMDes yang aktif beroperasi ini salahsatunya dialami oleh Provinsi Jawa Timur sesuai dengan penjelasan Emil E. Dardak yang menyebutkan dari 6.100 BUMDes di wilayah Jawa Timur, hanya 537 BUMDes yang berstatus maju apabila dipresentasikan, hanya 12% BUMDes yang berstatus maju (Kompas,2021).

Menurut Faradin dan Fanida (2021) Pembangunan BUMDes dapat berbeda-beda pada tiap-tiap desa yang berada di Indonesia. Maka untuk mengoptimalkan dan memotivasi pemerintah desa agar mereka bersemangat membentuk dan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan desa, beberapa pemerintah daerah memberikan *reward* untuk desa yang BUMDesnya berjalan dengan baik. Salah satunya yakni Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Meskipun Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Jawa Timur, Sidoarjo menjadi kabupaten yang memiliki PAD terbesar nomor tiga setelah Kota Batu dan Kabupaten Bojonegoro. Tingginya PAD yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo ini salah satunya tidak terlepas dari peran BUMDes dan

UMKM dan IKM. Salah satunya yang berperan yaitu BUMDes Ngingas Makmur Abadi.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi pada tahun 2019 BUMDes Ngingas Makmur Abadi Desa Ngingas, mendapat penghargaan Juara 1 sebagai BUMDes Berprestasi tingkat Jawa Timur melalui inovasi teknologi mesin pengolah sampah ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap pembakaran sampah bernama *incinerator* pembakar sampah ramah lingkungan berteknologi *sprayer*. Selain itu, pada kegiatan BUMDes award 2020 yang diadakan oleh PKKPB – ITS, BUMDes Ngingas Makmur Abadi juga mendapat pendampingan dari PKKPB – ITS karena menjadi salah satu pemenang pada kegiatan tersebut.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi merupakan penyumbang PAD terbanyak, di tahun 2019 dari total PAD Rp 90 juta per tahun, BUMDes Ngingas Makmur Abadi menyumbang Rp 50 juta. BUMDes memiliki usaha untuk memproduksi dan menjual mesin pembakar sampah, kemudian mengelola serta mempromosikan wisata edukasi kampung logam.

BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam mengembangkan IKM memiliki kendala yakni keterbatasan SDM dan BUMDes kesulitan untuk merangkul IKM agar dapat bergabung dibawah naungan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015) Penelitian kualitatif, yang didasarkan pada postpositivisme, meneliti kondisi obyek yang alamiah. Fokus penelitian ini yaitu melihat peran BUMDes sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data seperti pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teknik Analisis Data Model Miles Dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2019). Subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Ngingas, Direktur BUMDes Ngingas Makmur Abadi, Sekretaris BUMDes Ngingas Makmur

Abadi, pelaku usaha IKM atau *owner* CV. Cahya Logam Abadi Jaya, *owner* Podomoro Teknik, *owner* Sanisindometal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan IKM di Desa Ngingas yang telah berkembang tidak terlepas dari peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi. Sesuai dengan tugas BUMDes yakni mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi murni desa. Dimana potensi yang dimiliki Desa Ngingas yakni industri logam. Berikut pemaparan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti dari informan yang telah disesuaikan dengan teori peran menurut Diva (2009):

1. Peran BUMDes Sebagai Fasilitator

Fasilitator didefinisikan sebagai pihak yang menjembatani dan menyediakan sarana dan prasarana, pelatihan SDM, dan serta fasilitasi untuk promosi produk atau pemasaran. Berikut penulis akan menjelaskan peran BUMDes dalam pengembangan IKM sebagai fasilitator:

a. Fasilitator Sarana dan Prasarana

Dalam kegiatan pengembangan IKM di Desa Ngingas sarana dan prasarana adalah salah satu alat pendukungnya. Sarana dan prasarana berfungsi sebagai alat untuk memudahkan dan mempercepat jalannya suatu kegiatan. Pada temuan di lapangan, sarana prasarana yang dimaksud yaitu BUMDes memberikan informasi tempat yang menyediakan bahan baku yang diperlukan IKM. BUMDes memberikan fasilitas ini berawal dari adanya permasalahan yang dihadapi IKM dimana terkadang mereka kesusahan untuk menemukan bahan baku yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pelaku usaha IKM. Untuk mengatasi permasalahan ini, BUMDes mencoba memberikan alternatif yakni BUMDes Ngingas Makmur Abadi menjadi pihak ketiga sebagai informan tempat yang menyediakan bahan baku sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengusaha IKM. Sesuai dengan keterangan yang diungkapkan Bapak Zainuddin Arifin selaku Direktur BUMDes Ngingas Makmur Abadi:

“Terkait peran BUMDes dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana untuk IKM itu biasanya

kita jadi pihak ketiga. Jadi gini, kalau ada IKM yang membutuhkan bahan baku apa gitu, terus mereka nggak tahu harus beli dimana, biasanya kita ngasih info ke mereka, kita pesankan begitu.”
(Wawancara 05 Juni 2023)

Akan tetapi informasi terkait BUMDes memfasilitasi pemberian informasi tempat yang menyediakan bahan baku yang sesuai dengan yang diperlukan IKM pada kondisi di lapangan ternyata tidak tersebar luas ke semua pelaku usaha IKM. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM Bumdes.

Terkait pemberian fasilitas sarana dan prasarana, Pemerintah Desa Ngingas ataupun BUMDes selama ini belum pernah memberikan bantuan alat untuk menunjang pengembangan IKM. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Desa beranggapan bahwa IKM telah maju dan tidak memerlukan bantuan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes sudah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup baik, meskipun belum berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak meratanya informasi pemberian fasilitas. Dan pemberian fasilitas peralatan teknologi penunjang produksi IKM, Pemerintah Desa Ngingas ataupun BUMDes Ngingas Makmur Abadi sejauh ini belum pernah memberikan dengan alasan IKM yang telah menggunakan peralatan.

b. Fasilitas Pelatihan Peningkatan SDM

Pelatihan SDM adalah suatu cara yang dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, ataupun kreativitas yang nantinya dapat diimplementasikan di tempat usahanya. Tujuan pelatihan ini yaitu untuk memberikan pelatihan skill agar IKM dapat berinovasi mengembangkan usaha mereka.

BUMDes Ngingas memberikan pelatihan untuk IKM melalui program yang berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Ngingas. Pelatihan ini diadakan sebanyak dua hingga 4 bulan sekali dalam satu tahun.

Dampak positif adanya pelatihan ini cukup dirasakan peserta pelatihan hal ini

dibuktikan dengan setelah mengikuti pelatihan khususnya tentang pelatihan marketing online, yang sebelumnya berjualan secara door to door, sekarang telah merambah ke dunia digital:

“Pernah itu seingat saya pelatihan marketing online, dampaknya lumayan bisa kita terapkan. Dulu saya jualan door to door sekarang saya jualannya mulai online, jadi ya lumayanlah kemarin dapat ilmu terus bisa dipakai” (Wawancara 03 Juli 2023)

Pengurus BUMDes juga mendapat pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM pengurusnya, diantaranya Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo, Universitas Ciputra, dan Balai Besar Pelatihan Yogyakarta. Materi yang diberikan bersifat umum, diantaranya mengenai akuntansi sederhana, analisis SWOT, bisnis model canvas, serta perkembangan perubahan kebijakan pemerintah terkait desa.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah memberikan fasilitas pelatihan untuk memperbaiki kualitas SDM bagi IKM dengan cukup baik dan kebermanfaatannya dapat dirasakan langsung.

c. Fasilitas Pemasaran Produk

Tujuan pemasaran dapat membantu para pelaku IKM dalam memasarkan produk mereka lebih luas lagi. Promosi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan produk IKM pada pameran-pameran.

Selain itu, BUMDes juga menawarkan produk IKM ke pejabat contohnya anggota Komisi V DPR RI, serta memasarkan ke luar kota, contohnya seperti Madiun dan Malang.

Usaha BUMDes untuk memasarkan produk IKM disambut baik oleh IKM. Akan tetapi terdapat IKM yang tidak berminat untuk mengikutkan produknya dalam pameran, hal ini disebabkan pelaku usaha IKM yang produksinya masih terbatas khawatir tidak dapat memenuhi target pasar.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa BUMDes

telah ikut berperan dalam memasarkan produk IKM. Meskipun saat ini dampak dari usaha pemasaran yang dilakukan BUMDes Ngingas Makmur Abadi belum dirasakan secara langsung secara signifikan, para pelaku IKM tetap merasa senang karena produk mereka dapat dikenal lebih banyak masyarakat hingga ke pasar internasional.

2. Peran BUMDes Sebagai Katalisator

Pada konteks ini katalisator memiliki arti pihak yang berfungsi sebagai stimulat untuk mempercepat suatu proses pengembangan usaha IKM. Penelitian ini akan menjabarkan peran BUMDes sebagai katalisator sebagai berikut:

a. Pendanaan

Dana merupakan aspek yang 58 sangat berperan penting dalam pengembangan IKM khususnya untuk meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan usaha. Terkait pendanaan usaha, BUMDes mendapat anggaran dari APBDes setiap tahunnya.

Berikut ini tabel data penyertaan modal yang didapat BUMDes dari APBDes Desa dari Tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 4.1 Penyertaan Modal Yang Didapat BUMDes Ngingas Makmur Abadi Dari APBDes

Tahun	Jumlah Penyertaan Modal
2018	Rp 225.000.000,-
2019	Rp 150.000.000,-
2020	Rp 100.000.000,-
2021	Rp 50.000.000,-
2022	Rp 75.000.000,-

Sumber: Olahan data peneliti, 2023

Penggunaan penyertaan modal dari desa tersebut hanya diperbolehkan untuk memproduksi atau untuk belanja barang untuk dijual. Tidak diperbolehkan untuk pengembangan usaha termasuk pelatihan. Hal ini disebabkan karena desa memiliki anggaran tersendiri untuk pelatihan.

Apabila IKM membutuhkan bantuan dana, mereka akan memilih mengajukan pinjaman ke Bank. Selama ini, pihak Bank berkeliling menawarkan produk kredit

mereka ke IKM Ngingas. Seperti penjelasan Bapak Fajar selaku owner Podomoro Teknik:

“kami gak pernah dapat bantuan apapun mbak. Kalau butuh dana ya kami cari sendiri ke bank, biasanya ke BRI pakai KUR itu” (Wawancara 03 Juli 2023)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa BUMDes Ngingas Makmur Abadi tidak berperan dalam pendanaan pengembangan IKM. Hal ini disebabkan karena dana BUMDes hanya diperbolehkan untuk produksi usaha BUMDes dan atau belanja barang untuk diperjual belikan.

b. Kerja Sama

Untuk mempercepat proses pengembangan IKM, BUMDes melakukan kerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan. BUMDes menawarkan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk melakukan magang di IKM yang berada di Ngingas. Untuk target dan sasaran dari BUMDes ini yaitu sekolah yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Yogyakarta, Ponorogo, dan Jember. Untuk sekolah yang dalam waktu dekat ini akan melakukan magang yaitu SMK PGRI Ponorogo yang melakukan magang selama 8 bulan dan SMKN 2 Jember yang melakukan magang selama 6 bulan.

Akantetapi tidak semua IKM menerima siswa magang dikarenakan usahanya yang masih kecil:

“kami tidak menerima mbak, soalnya usaha kami masih kecil” (Wawancara 03 Juli 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa BUMDes cukup berperan dalam mempercepat pengembangan IKM melalui program kerja sama. Akan tetapi dari beberapa IKMyang skalanya masih tergolong kecil, mereka memilih untuk tidak menerima siswa magang. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tempat.

3. Peran BUMDes Sebagai Regulator

Regulasi dapat menjadi acuan atau pedoman bagi BUMDes untuk melakukan pengembangan IKM. Dalam menjalankan usahanya, BUMDes Ngingas Makmur Abadi mengeluarkan peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengurusnya yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

Pada perannya dalam pengembangan IKM, BUMDes Ngingas Makmur Abadi tidak memiliki kebijakan yang terkait dengan pengembangan IKM, hal ini disebabkan karena apabila BUMDes membuat regulasi untuk IKM, BUMDes khawatir IKM akan keluar dari naungannya BUMDes. Sejauh ini, regulasi untuk pengembangan IKM baik yang dikeluarkan Pemerintah Desa hanya sebatas peraturan batasan maksimal lembur pukul 21.00 WIB.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam pengembangan IKM, BUMDes tidak memiliki peran sebagai regulator. Pada pengembangan IKM di Desa Ngingas ini, tidak ada regulasi yang mengatur tentang pengembangan IKM, hanya regulasi yang mengatur tentang jam kerja IKM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngingas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan peran BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Desa Ngingas.

Pada indikator fasilitator, BUMDes Ngingas Makmur Abadi memiliki peran dalam pengembangan IKM di Desa Ngingas. Hal ini ditunjukkan dengan BUMDes berperan dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana, pelatihan peningkatan SDM, dan pemasaran produk. Dimana ketiga indikator tersebut dijalankan dengan baik. Akan tetapi pada program pelatihan peningkatan SDM, terdapat kendala dimana terdapat pelaku usaha IKM yang tidak mengikuti pelatihan apabila topik pelatihan tidak menarik. Sehingga hal ini menjadi tugas bagi para penyelenggara pelatihan untuk kedepannya dapat membuat pelatihan dengan topik yang selalu menarik.

Pada indikator katalisator, BUMDes Ngingas Makmur Abadi dalam menjalankan perannya cukup baik meskipun belum maksimal karena terdapat indikator yang tidak terpenuhi. BUMDes berperan dalam melakukan kerja sama dengan beberapa SMK

untuk menawarkan program magang di IKM Desa Ngingas. Selain itu, BUMDes juga memperkenalkan produk IKM ke pejabat-pejabat Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan pendanaan IKM, BUMDes tidak memiliki peran. Karena permodalan BUMDes hanya diperbolehkan untuk produksi dan atau untuk belanja barang untuk diperjualkan.

Pada indikator regulator dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) BUMDes Ngingas Makmur Abadi tidak memiliki peran. BUMDes Ngingas Makmur Abadi hingga Pemerintah Desa Ngingas tidak mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan IKM. Regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur IKM Desa Ngingas hanya berkaitan dengan batas maksimal jam lembur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ngingas, bukan BUMDes Ngingas Makmur Abadi. BUMDes hanya mengeluarkan regulasi untuk pengurusnya berupa SOP yang tertuang pada AD ART.

Saran

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dapat membuat tempat atau galeri di Desa Ngingas yang dijangkau oleh banyak orang, contohnya Kantor Desa dan atau kantor BUMDes.
2. BUMDes Ngingas Makmur Abadi dapat melakukan rekrutmen pegawai yang sifatnya *freelance*.
3. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di Desa Ngingas khususnya yang berada di bawah naungan BUMDes Ngingas Makmur Abadi diharapkan dapat turut aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) baik yang diinisiasi oleh BUMDes, Pemerintah Desa, ataupun pihak luar.
4. Pemerintah Desa Ngingas dapat membuat regulasi yang berkaitan dengan pengembangan IKM agar dapat tercipta tertib administrasi dan arah pengembangan IKM Desa Ngingas dapat lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Suleman, d. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Adi, F. N., & Surya, I. (2018). Peran Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam Meningkatkan Produksi Pertanian. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 6, 1739–1750.

- Alfrida Heanity Panjaitan, A. E. (2022). Optimalisasi Kebijakan BUMDes KEMENDES PDTT Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa . *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 1-31.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2018-2021). *Persentase Penduduk Miskin (P0)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik (BPS): <https://www.bps.go.id/indicator/23/184/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- Badan Pusat Statistika. (2020). Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Sidoarjo Tahun 2018. BPS Kabupaten Sidoarjo
- Bakhri, S. (2020). *Membangun Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan IKM (Industri Kecil Dan Menengah)*. Yogyakarta: K-Media.
- Cakrawala. (2020, Februari 11). Retrieved Januari 19, 2023, from Cakrawala: <https://www.cakrawala.co/jatim/pr-7755105134/bumdes-desa-ngingas-berprestasi-tingkat-jawa-timur>
- Dani H. Lambuaso, S. P. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan . *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-9.
- Faradin, S. & Fanida, E. H. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Tirto Abadi Melalui Strategi Pengembangan Agrowisata Kebun Belimbing Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 9, 81-96.
- Febrianti, E. & Eprilianto, D. F. (2022). Analisis Peran *Stakeholders* Daerah Dalam Pengembangan *City Branding* "Lamongan Megilan". *Publika*, 11, 1849-1852.
- Sihombing, L. M. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Lae Pinang Kabupaten Dairi. Skripsi. Medan: Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area
- Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Public Administration Journal*, 3.
- Gogor Arif Handiwibowo, M. S. (2021). Studi Kelayakan BUMDes Ngingas Makmur Abadi, Waru - Sidoarjo Sebagai Teaching Industry Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal Abdimas Musi Charitas*, 106-112.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prastika, H. P. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Skripsi. Surabaya: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga
- Kementerian Desa, P. Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (2020). *Pendaftaran Nama dan Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama*. Retrieved Januari 19, 2023, from Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: <https://bumdes.kemendesa.go.id/>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Kristina Eti, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 120-124.
- Laksono, B. A. (2018, September). The Community Empowerment Through Social and Educational Institutions. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 6, 115-122.

- Maryani, D. & Nainggolan (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish.
- Muhammad Daud, Y. M. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*, 29-38.
- Muhammad Elsa Tomisa, M. S. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 91-101.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Putri Nugrahaningsih, H. M. (2018). Optimalisasi Peran BUMDes Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata . *Prosiding PKM-CSR*, 1532-1545.
- Salihin, A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik . *Jurnal Administrasi Publik*, 1203-1212.
- Sari, W. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.
- Sidoarjo, K. (2023, Januari 25). *Kabupaten Sidoarjo*. Retrieved Januari 25, 2023, from BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR: <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sidoarjo/>
- Siswanda, K. P. & Meirinawati (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Mengembangkan Wisata Embung Di Desa Kertosari Kabupaten Pasuruan. *Publika*, 323-334.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, M. F. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) "Handycraft" Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro (Studi Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro). *Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*.
- Theresia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Utami, dkk. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi di Desa Ngadirejo Slwa, Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. *Journal of Public Sector Innovations*, 97-104.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9.